KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Evaluasi Rencana Isoman di Hotel
Tanggal : Sabtu, 31 Juli 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Evaluasi Rencana Isoman di Hotel

Ketua DPR Puan Maharani turut menolak rencana isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR. Setjen DPR berjanji mengikuti suara penolakan yang muncul.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani turut meminta agar fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19 dievaluasi ulang. Atas penolakan fasilitas itu, baik dari Ketua DPR, anggota DPR, maupun beberapa kalangan di publik, Sekretariat Jenderal DPR berjanji akan mengikutinya. Realisasi dari janji itu perlu terus dikawal guna memastikan prinsip sama rata dan sama rasa berlaku selama pandemi Covid-19.

"Melihat kondisi saat ini, penyediaan fasilitas isolasi terpusat khusus bagi karyawan, perangkat, ataupun anggota DPR belum perlu dilakukan," kata Puan melalui keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).

Oleh karena itu, politisi PDI-P ini mengaku telah meminta Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengevaluasi kembali rencana isolasi terpusat di hotel bagi pasien Covid-19 yang berasal dari lingkungan DPR. Sebagai gantinya, ia meminta Setjen DPR berkoordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19 yang menyediakan isolasi terpusat. Ini untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan dari pasien Covid-19 yang bekerja di DPR.

"Jadi kalau ada pasien Covid-19 dari karyawan, perangkat, atau anggota DPR yang mengalami perburukan kondisi, bisa segera teratasi," ujarnya.

Sebelumnya, beredar di publik terkait pemberitahuan soal pemberian fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19 dalam surat dari Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tertanggal 26 Juli 2021. Fasilitas isoman di dua hotel di Jakarta bagi anggota DPR yang tak mengalami gejala ataupun yang bergejala ringan. Dalam paket fasilitas isolasi mandiri itu, anggota DPR akan mendapatkan layanan pemeriksaan dokter, vitamin tiga kali sehari, makan tiga kali sehari, layanan tes usap PCR, dan tes antigen. Semua fasilitas itu, termasuk hotel, biayanya akan ditanggung negara (*Kompas*, 28/7/2021).

Sebelum Puan mengeluarkan pernyataan menolak fasilitas isoman di hotel, tak sedikit anggota DPR dari lintas fraksi yang juga menyuarakan penolakan. Di antaranya dari PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini, misalnya, meminta agar Setjen DPR memfungsikan fasilitas yang dimiliki DPR, seperti Wisma DPR di Kopo, Bogor, atau fasilitas milik DPR lainnya untuk isoman, daripada harus menyewa kamar hotel.

Fasilitas itu tidak hanya digunakan oleh anggota dan pegawai DPR, tetapi juga terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi mandiri.

"Mari kita bantu dan berempati kepada warga masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, terutama yang terpapar Covid-19," katanya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Ahmad Ali pun mengatakan, fraksinya secara tegas menolak fasilitas isoman di hotel bintang tiga. "Menurut kami, kebijakan tersebut berlebihan mengingat saat ini tidak sedikit masyarakat bawah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Akan lebih tepat jika fasilitas tersebut dialokasikan untuk kalangan rakyat bawah," katanya.

Fraksi Nasdem mengajak semua pihak berempati terhadap mereka yang penuh keterbatasan di tengah kondisi pandemi saat ini. Nasdem memandang para anggota Dewan bisa mengurus dirinya sendiri beserta keluarga guna membiayai kebutuhan isoman.

Selain dari internal DPR, penolakan atas fasilitas isoman di hotel juga disuarakan berbagai kalangan di masyarakat.

Lebih nyaman di rumah

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa, yang pernah isoman selama 16 hari di rumahnya saat terpapar Covid-19, akhir Juni lalu, mengatakan, isoman di rumah sendiri lebih nyaman dibandingkan di hotel. Sebab, ruang gerak di hotel terbatas dan berisiko membuat tamu hotel lainnya tertular Covid-19. Ia pun yakin sebagian besar anggota DPR memilih isoman di rumah seperti dirinya.

"Isoman di rumah lebih nyaman dan tenang dibandingkan di hotel. Ruang di rumah lebih luas untuk aktivitas, seperti olahraga dan berjemur, untuk membantu mempercepat pemulihan. Ini sulit dilakukan di hotel yang ruangannya terbatas," kata Saan.

Alih-alih anggaran digunakan untuk menyewa hotel, menurut Saan, lebih baik anggaran digunakan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak. Sebagai contoh, untuk mempercepat vaksinasi Covid-19. DPR bisa saja melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat umum sehingga anggaran yang dikeluarkan bisa lebih dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.

Ikuti suara publik

Atas kuatnya penolakan terhadap rencana fasilitas isoman di hotel, Sekjen DPR Indra Iskandar menyatakan akan mengevaluasi program itu. Menurut dia, program itu keluar salah satunya sebagai bentuk perhatian kepada orang-orang yang bekerja di lingkungan DPR saat terpapar Covid-19.

"Kalau publik menilainya berbeda, kami akan ikuti. Sebab dana untuk isoman di hotel pun belum dianggarkan. Bahkan ada *refocusing* anggaran hingga Rp 178 miliar," ucapnya. Hingga kini, pihaknya masih menyiapkan Wisma DPR di Kopo sebagai tempat isolasi mandiri. Wisma DPR itu berkapasitas 50 orang.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Wasisto Raharjo Jati, mengatakan, Sekjen DPR semestinya mengikuti mayoritas anggota DPR yang telah menolak program isoman di hotel itu. Apalagi Ketua DPR pun telah menolaknya. "Kalau ada manuver pribadi justru bisa menuai kecaman publik," katanya.

Di sisi lain, pimpinan dan anggota DPR perlu memastikan penolakan mereka dilaksanakan. Sebab jika program ini berlanjut, kredibilitas DPR bisa semakin merosot, bahkan bisa diberi label sebagai lembaga yang tidak pro rakyat. Sebab, saat kondisi krisis dan rakyat kesusahan, DPR terus merasa lebih superior dengan menikmati fasilitas-fasilitas berlebih.

Tak hanya itu, mungkin saja publik akan menghukum dengan tidak memilih lagi anggota DPR yang saat ini menjabat pada Pemilu 2024, karena mereka dianggap membiarkan fasilitas berlebih diterimanya saat rakyat sedang kesusahan. "Di masa pandemi ini, semua orang itu harus sama rata dan sama rasa," kata Wasisto. (SYA)

▶ **klik.kompas.id/polhuk**
Baca artikel lainnya seputar Politik dan Hukum di Kompas.id dengan memindai QR Code.